

Kebangkitan “Aseng”? Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa

by Dion Prasetya

Submission date: 23-Jul-2019 12:25AM (UTC-0700)

Submission ID: 1154286647

File name: naskah_fisip_umm_27_februari_2018.pdf (518.25K)

Word count: 3460

Character count: 22684

Kebangkitan “Aseng”!

Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa

Oleh: Dion Maulana Prasetya

“Mana lebih buruk: politisi Amerika yang lebih jujur, tetapi telah memicu perang ideologi atau politisi Indonesia yang suka mengelabui rakyat, tetapi akhirnya memilih kebijakan yang memajukan kepentingan bangsanya?”

R. William Liddle.

Kata-kata di atas merupakan kutipan dari artikel William Liddle berjudul “Ekonomi Kerakyatan” yang dimuat di Koran Kompas, 19 Oktober 2012. Di dalam opininya Liddle membandingkan model kebijakan ekonomi Amerika Serikat dan Indonesia yang menurutnya memiliki kesamaan, khususnya dalam upaya memakmurkan rakyatnya. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan mencolok, kutipan di atas adalah contohnya. Sebagai seorang pakar Indonesia, khususnya di bidang politik, ucapan Liddle itu tentunya tidak bisa dianggap sebagai “angin lalu” saja. Meski begitu, melihat perkembangan politik domestik yang sangat fluktuatif akhir-akhir ini, Riddle agaknya perlu merevisi pandangannya. Selain suka mengelabui rakyatnya, politisi Indonesia kontemporer juga kerap memicu perang identitas di dalam masyarakat.

Naiknya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo pada tahun 2014 merupakan salah satu penanda penting akan bangkitnya politik identitas. Salah satu isu yang muncul berkaitan dengan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah isu pribumi

melawan “asing”. Dalam konteks ini “asing” disandingkan dengan term “aseng” yang merujuk pada golongan beretnis Tionghoa. Istilah “aseng” ini bertebaran di banyak unggahan media sosial, buku, maupun *statement* elit politik di dunia nyata (Sarwanto, 2017). Dari sudut pandang semiotika, penanda “aseng” memiliki makna denotasi sebagai sebuah nama yang umum untuk individu beretnis Tionghoa. Sedangkan makna konotasinya merujuk kepada WNI beretnis Tionghoa yang kaya raya dan/atau pro terhadap kepentingan Tiongkok. Hasil dari konstruksi makna konotatif atas istilah “aseng” ini adalah semakin mengkristalnya sentimen SARA pada tataran akar rumput, khususnya di Jakarta, semenjak Ahok menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada tahun 2014.

Peristiwa pemukulan seorang pemuda beretnis Tionghoa bernama Andrew Budikusuma di dalam Bus Transjakarta (26/08/16) merupakan salah satu dampak dari bangkitnya politik identitas. Saat itu Andrew diteriaki oleh beberapa orang tidak dikenal dengan sebutan “Ahok” (Sohuturon, 2016). Sekelompok orang tidak dikenal tersebut melakukan provokasi terhadap Andrew dengan ungkapan-ungkapan bernada rasistik sebelum akhirnya melakukan pemukulan terhadap Andrew (Laturiuw, 2016). Selain itu munculnya ratusan spanduk “tidak mensholatkan jenazah pendukung & pembela penista agama (Ahok - pen)” dan sejenisnya di beberapa titik di Jakarta juga dapat menjadi gejala meningkatnya politik identitas (Ibrahim, 2017). Secara umum peristiwa-peristiwa itu menunjukkan adanya proses konstruksi sosial yang menjadikan etnis Tionghoa dan negara Tiongkok sebagai musuh atau ancaman Bangsa Indonesia.

Hasil survei Median menemukan fakta menarik mengenai persepsi warga DKI terhadap negara yang dianggap paling mengancam atau merugikan bagi Indonesia (Median, 2017). Sebesar 40.7 persen warga DKI menjawab Tiongkok sebagai negara yang dikhawatirkan paling mengancam atau merugikan Bangsa Indonesia. Disusul berturut-turut oleh Amerika Serikat (25.6 persen), Australia (5.5 persen), dan Malaysia (4.0 persen). Dalam survei tersebut terungkap bahwa alasan mengapa Tiongkok dianggap mengancam adalah karena

dikhawatirkan menguasai ekonomi (29.3 persen), banyak TKA masuk (26.8 persen), serta menjajah Indonesia (11 persen). Sekali lagi, seperti yang terjadi di dalam sejarah, identitas Tionghoa/Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan sosial-ekonomi-politik bangsa Indonesia.

Tulisan ini mencoba untuk melacak asal-usul konflik etnis, khususnya konflik antara etnis Jawa dan Tionghoa, dan perkembangannya dalam sejarah bangsa Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan sejarah, tulisan ini menyimpulkan bahwa konflik antara etnis Jawa dan Tionghoa tidaklah bersifat alamiah (*natural*). Hal tersebut didasarkan atas dua argumen: *pertama*, hubungan antara etnis Jawa dan Tionghoa berlangsung baik selama ratusan tahun sebelum kolonialisme menancapkan pengaruhnya di Nusantara pada abad 17; *kedua*, sepanjang sejarah, terjadinya konflik Jawa-Tionghoa selalu dipicu oleh politisasi identitas, baik dilakukan oleh penguasa kolonial maupun pemerintah Indonesia, demi mencapai kepentingannya.

Tulisan ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama membahas mengenai definisi politik identitas, sedangkan bagian dua dan tiga secara berturut-turut membahas tentang kosmopolitanisme sebelum era kolonial, serta sejarah munculnya politik identitas dan konflik etnis di Pulau Jawa.

POLITIK IDENTITAS

Pada bagian ini akan dibahas mengenai identitas dan bagaimana ia berkelindan dengan politik. Konsep identitas merupakan salah satu bahasan utama dalam studi sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan tentang pertautan antara “Diri” (*the Self*) dengan “Yang Lain” (*Others*), antara individu dan masyarakat, antara “saya” dan “kamu”, antara “kami” dan “mereka”. Amin Maalouf dalam bukunya berjudul “In the Name of Identity” (2012) menulis, “Identitas saya adalah apa yang mencegah saya jadi identik dengan orang lain.” Pengertian yang disampaikan oleh Maalouf tersebut sangat sederhana

namun meliputi segala hal yang kita butuhkan untuk memahami identitas.

Definisi yang lebih “ilmiah” dikemukakan oleh Manuel Castells. Dalam “The Power of Identity” (2010), Castells menulis,

“Identity is people’s source of meaning and experience”. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa identitas adalah: “the process of construction of meaning on the basis of a cultural attribute, or a related set of cultural attributes, that is given priority over other sources of meaning.”

Konstruksi identitas, menurut Castells, menggunakan bahan-bahan yang berasal dari sejarah, geografi, biologi, institusi-institusi produktif-reproduktif, ingatan kolektif, fantasi personal, kekuasaan politik, maupun wahyu Ilahi. Baik identitas personal maupun sosial menggunakan bahan-bahan tersebut secara kontekstual. Sehingga menurut Castells, siapa dan apa tujuan dari konstruksi identitas kolektif menentukan makna simbolik yang berfungsi menempatkan “Diri” (*the Self*) dan “Lainnya” (*the Others*).

Politik identitas, menurut Sri Astuti (Buchari and Bainu⁶ 2014), merupakan suatu alat perjuangan politik suatu etnis untuk merebut kekuasaan dengan memanipulasi kesamaan identitas atau karakteristik keetnisan tertentu yang tumbuh di dalam kehidupan sosial budayanya. Sedangkan menurut pandangan Ahmad Syafii Maarif (Maarif 2010), politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Namun, menurut Siti Musdah Mulia (Maarif 2010), bentuk politik identitas di Barat dan Indonesia berbeda. Di Amerika Serikat, seperti disampaikan oleh Syafii Maarif di atas, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara.

Sedangkan untuk kasus Indonesia, politik identitas dilakukan oleh kelompok “*mainstream*”, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat “menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya “menyimpang” atau “menyeleweng”.

Meski tidak membahas politik identitas secara umum namun kajian Jack Snyder tentang nasionalisme SARA (*ethnic nationalism*) dapat dijadikan sebagai rujukan. Mengutip pandangan Anthony D. Smith, Snyder (Snyder et al. 2003) mengungkapkan bahwa nasionalisme SARA mendasarkan legitimasinya pada budaya, bahasa, suku, ras, agama, pengalaman sejarah, dan/atau mitos nenek-moyang yang sama, dan menggunakan berbagai kriteria itu untuk memasukkan atau mengeluarkan orang ke dalam dan dari kelompok nasional. Menurut Snyder konflik etnis terjadi ketika para elit melakukan propaganda dan menjual nasionalisme SARA untuk mendapatkan kepentingannya. Ia mengambil kasus Burundi dan Rwanda sebagai contoh bagaimana politik identitas memainkan perannya dan berdampak sangat destruktif. Snyder meyakini bahwa kemiskinan dan kurangnya pengetahuan politik jika bertemu dengan warisan kolonial *divide et impera* dan rekayasa sentiment SARA, akan menciptakan kerusuhan etnis paling berdarah. Apa yang disampaikan oleh Snyder itulah yang dipergunakan sebagai kerangka analisis dalam tulisan ini.

Guna memahami asal-usul konflik etnis Jawa-Tionghoa maka perlu dipaparkan terlebih dahulu mengenai kondisi Jawa di era pra-kolonial. Gambaran mengenai Jawa di era tersebut, khususnya deskripsi tentang hubungan antar bangsa, adalah gambaran tentang kosmopolitanisme yang sempat bertahan selama ratusan tahun. Hubungan yang terjalin antara etnis pribumi dengan pendatang yang berasal dari Tiongkok, India, maupun Arab, berlangsung dengan sangat baik. Hal ini yang penulis jadikan sebagai argumentasi dasar bahwa konflik etnis di Jawa tidak bersifat alamiah/natural, melainkan dipicu oleh politik identitas yang dilancarkan oleh para elit politik. Bagian tersebut akan dipaparkan di bagian selanjutnya dari tulisan ini.

JAWA YANG KOSMOPOLIT

Pada tahun 1990 sejarawan Prancis, Denys Lombard, menulis prakata yang menyentak di dalam *magnum opus*-nya *Le Carrefour Javanais*. Ia menulis: “Sungguh tak ada satu pun tempat di dunia ini – kecuali mungkin Asia Tengah – yang, seperti halnya Nusantara, menjadi tempat kehadiran hampir semua kebudayaan besar dunia, berdampingan atau lebur menjadi satu.” Selama seribu tahun (dari abad ke-5 sampai ke-15) Sumatra, Jawa, dan Bali dipengaruhi oleh kebudayaan-kebudayaan India, sebelum pengaruh Islam dan Tionghoa mulai menguat di abad ke-15. Pada akhirnya peradaban Eropa, dalam hal ini Belanda, juga hadir dan ikut memengaruhi Nusantara, khususnya pulau Jawa sejak abad ke-17.

Lombard menggambarkan pulau Jawa (pesisir) abad pertengahan sebagai daerah-daerah yang sangat kosmopolit. Berdasarkan deskripsi Ma Huan di dalam bukunya *Yingyai Shenglan*, Lombard (2008: 42) menyimpulkan bahwa suasana kota-kota Pesisir Jawa sangatlah kosmopolit karena menjadi pusat-pusat perdagangan global. Di Surabaya dan Gresik para pedagang dan pembeli, baik itu bangsa Tionghoa maupun pribumi, berkumpul menjadi satu untuk mencari keuntungan. Bahkan digambarkan saat itu di Surabaya sebagian besar penduduknya adalah orang Tionghoa. Hal yang kurang lebih serupa juga dapat disaksikan di Cirebon dan Banten. Di Cirebon, sebuah naskah Jawa berjudul *Purwaka Caruban Nagari* menyebutkan bangsa-bangsa yang kerap mengunjungi pelabuhan kota tersebut yaitu: “orang Tionghoa, Arab, Parsi, India, orang dari Malaka, Tumasik, Pasai, Jawa Timur, Madura, dan Palembang.”

Sedangkan mengenai Banten, berdasarkan kesaksian Pyrard de Laval (dikutip oleh Lombard, 2008: 55-56) kota Banten sangat bernuansa kosmopolit. Menurutnya, kota Banten dikelilingi oleh tembok besar yang didalamnya terdapat lima lapangan besar tempat menampung pasar untuk segala macam barang dagangan. Sedangkan di luar tembok besar tersebut terdapat sejumlah rumah untuk orang asing. Berikut penulis

kutipkan secara langsung deskripsi Pyrard mengenai perdagangan Banten:

“Kota itu dikunjungi banyak bangsa; sebab di sana terjadi tukar-menukar dan perdagangan oleh segala macam orang asing, baik yang beragama Nasrani dan yang dari India, maupun orang Arab, Gujarat. Malabar, Bengali, dan Malaka, yang datang terutama untuk memperoleh lada yang tumbuh berlimpah-ruah di pulau itu... Saya melihat banyak langganan orang Tionghoa, yang berdagang dengan ramai, dan setiap tahun pada bulan Januari datanglah sembilan atau sepuluh kapal besar dari Tionghoa... Orang Tionghoa itu telah membangun rumah-rumah yang indah untuk menampung mereka selama mereka berdagang, dan sampai menjadi kaya...”

Nuansa kosmopolit dari kota-kota Pesisir pulau Jawa dapat kita tangkap dari deskripsi novelis Pramoedya Ananta Toer. Di dalam novel sejarahnya yang berjudul “Arus Balik”, Pramoedya menggambarkan bagaimana peran penting syahbandar Tuban dalam perdagangan abad ke-15-16. Syahbandar Tuban digambarkan sebagai orang Moro atau Maroko, yang menguasai bahasa Melayu, Jawa, dan Arab. Tentunya deskripsi Pramoedya tersebut tidaklah tanpa dasar. Diberitakan bahwa para syahbandar di daerah Pesisir Jawa adalah “orang asing” (Qurtuby, 2003: 61). Syahbandar Jepara yang menemui kapal-kapal Belanda pada tahun 1616 dan 1619 adalah seorang keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan pelabuhan Jaratan yang juga dipegang oleh syahbandar keturunan Tionghoa – di mana istrinya menjadi pemimpin kaum Tionghoa di Betawi kala itu. Tidak berbeda dengan Jepara dan Jaratan, pelabuhan Gresik di abad ke-15 juga dipegang oleh seorang keturunan Tionghoa bernama “Nyai Gede Pinatih”. Sebagai syahbandar wajib hukumnya menguasai berbagai bahasa yang umum digunakan para pedagang di Jawa saat itu. Tugas

dan fungsi yang sama telah ada semenjak era Majapahit meski dengan nama berbeda, yaitu *rakryan kanuruhan*.

Agaknya suasana kosmopolit tersebut tetap terjaga hingga menjelang abad ke-17, di mana VOC mulai menancapkan pengaruhnya di tanah Jawa. Memanfaatkan perubahan orientasi kerajaan Mataram yang lebih ke arah agraris, masuk ke pedalaman Jawa, dan cenderung bersifat *inward-looking*, VOC memperluas pengaruhnya sampai akhirnya menguasai kota-kota pelabuhan di Pesisir utara Jawa. Tidak cukup sampai di situ, pemerintah kolonial kemudian menciptakan “garis identitas” yang tegas antara masyarakat Tionghoa “pendatang” dan masyarakat Jawa “pribumi” pada tahun 1619 guna mendukung monopoli VOC di tanah Jawa.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P.Coen mengatakan, “Tak ada golongan masyarakat yang lebih baik bagi kepentingan kita dan lebih luwes dalam pergaulan kita daripada masyarakat Tionghoa,” (Tomoidjojo, 2012: 2). Inilah titik awal dari diterapkannya politik identitas yang berujung pada lahirnya sentimen etnis, di mana “Jawa” (*the Self*) berperan sebagai komunitas pemegang hak tunggal dari segala sumber daya di tanah Jawa, sedangkan “Tionghoa” (*the Other*) berperan sebagai pendatang dengan hak-hak yang sangat terbatas.

POLITIK IDENTITAS DAN KONFLIK ETNIS

Terdapat dua faktor utama yang jika bertemu dengan politik identitas bisa menjadi bahan bakar terjadinya konflik etnis di Jawa. Faktor-faktor tersebut adalah dominannya kekuatan VOC dan menurunnya pengaruh kerajaan di Jawa. Dominasi VOC mengantarkannya pada hak monopoli pelabuhan-pelabuhan dagang Pesisir, khususnya Batavia. Menurunnya pengaruh kerajaan berimbas pada berubahnya orientasi kerajaan; dari sebelumnya – di masa Majapahit-Demak – lebih berorientasi pada pertanian-perdagangan menjadi pertanian murni di era kerajaan Mataram. Posisi istimewa yang diberikan oleh pemerintah kolonial terhadap masyarakat Tionghoa ditambah dengan kecurigaan kerajaan Mataram

(pedalaman) atas daerah-daerah Pesisir, semakin menguatkan perbedaan-perbedaan identitas berbasis etnis antara masyarakat Jawa yang pribumi dengan masyarakat Tionghoa pendatang.

Pada tahun 1740 politik identitas yang dijalankan oleh VOC mencapai puncaknya. Tercatat pada tahun tersebut terjadi pembantaian massal etnis Tionghoa di Angke (Wijayakusuma, 2005). Penyebab utama dari terjadinya konflik bermotif etnis ini adalah ketakutan VOC akan terus bertambahnya populasi etnis Tionghoa di Batavia. Kekhawatiran VOC bertambah mengingat kedekatan etnis Tionghoa dengan masyarakat pribumi telah terjalin selama ratusan tahun. Persatuan masyarakat Tionghoa dan pribumi dianggap sebagai ancaman besar atas dominasi VOC di Batavia dan pulau Jawa pada umumnya.

Guna melemahkan pengaruh orang-orang Tionghoa, VOC menerapkan kebijakan pembatasan yang ketat ditambah penarikan pajak tinggi kepada para pendatang. Namun sayangnya usaha itu kurang berhasil, karena populasi masyarakat Tionghoa justru bertambah dari tahun ke tahun. VOC merespon kegagalan kebijakan tersebut dengan semakin menekan masyarakat Tionghoa dengan kembali menaikkan pajak. Kebijakan tersebut dirasakan masyarakat Tionghoa sebagai pemerasan dan penindasan, sehingga menyulut ide untuk melakukan perlawanan. Namun sebelum rencana itu terlaksana, pihak VOC telah mengetahuinya terlebih dahulu.

Tindakan preventif segera dilakukan oleh VOC dengan melakukan penggeledahan ke rumah-rumah warga, yang diiringi dengan penyebaran kabar burung di kalangan pribumi bahwa warga etnis Tionghoa tidak hanya akan melakukan perlawanan terhadap VOC tetapi juga berniat menghabisi warga pribumi. Sayangnya kabar burung provokatif tersebut dianggap benar oleh masyarakat pribumi. Sehingga ketika warga Tionghoa melancarkan rencananya menyerang kota untuk menyelamatkan warga Tionghoa yang ditangkap oleh kompeni, pembantaian massal mulai dilakukan oleh VOC dan juga budak-budak serta warga pribumi yang termakan isu provokatif di atas. Tercatat sebanyak sepuluh ribu etnis Tionghoa menjadi korban pembantaian tersebut (Wijayakusuma, 2005).

Politik pecah belah (*divide and rule*) bermotif etnis pemerintah kolonial terus berjalan. Puncaknya pada tahun 1854 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan rasis yang tertuang dalam *Indische Staatsregeling* No. 163 IS/1854. Isi dari kebijakan tersebut adalah membagi masyarakat ke dalam tiga kelas: orang-orang Belanda atau Eropa sebagai masyarakat kelas satu; penduduk dari etnis Asia (India, Tionghoa, dan Arab) sebagai masyarakat kelas dua; dan penduduk lokal sebagai masyarakat pribumi. Pembagian kelas sosial tersebut tidak hanya berhenti pada pelabelan semata tetapi terdapat peran dan fungsi (ekonomi) yang melekat pada masing-masing kelas. Masyarakat Eropa merupakan pemilik perusahaan, masyarakat Tionghoa sebagai pedagang kelas menengah, sedangkan masyarakat pribumi sebagai petani atau pedagang kecil (Lembong, 2008: 49). Kebijakan itu tentunya semakin mempertajam sentimen etnis yang sebelumnya sudah dipupuk oleh pemerintah kolonial.

Stratifikasi sosial yang diciptakan oleh pemerintah kolonial tersebut begitu kuat pengaruhnya, sehingga setelah kemerdekaan diraih bangsa Indonesia, kebijakan-kebijakan bernuansa rasis masih terus dijalankan. Terdapat satu kebijakan bernuansa rasis yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Lama di tahun 1959. Pada bulan Mei 1953 munculkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden 10/1959 tentang larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah swatantra tingkat I dan II serta karesidenan. Pemerintah Orde Lama memberi waktu kepada para pemilik usaha kecil dari unsur “asing” untuk menutup usahanya hingga tanggal 1 Januari 1960. Kebijakan tersebut merupakan salah satu program nasionalisasi (Indonesianisasi) yang marak diterapkan pada zaman itu.

Dampak dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah ketegangan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tionghoa (RRC). Menanggapi kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah RRC mengirimkan satu kapal besar untuk mengangkut orang-orang Tionghoa kembali ke tanah airnya. Sebanyak 100.000 warga etnis Tionghoa mengambil kesempatan yang diberikan oleh pemerintah RRC tersebut

(Mackie, 1976: 92). Sisanya harus berjuang di tengah kondisi politik yang masih tidak menentu bagi mereka di waktu itu.

Kebijakan bernuansa rasis tersebut tidak pelak menciptakan konflik, seperti yang telah terjadi di masa penjajahan. Memori alam bawah sadar mengenai dominasi etnis Tionghoa dalam bidang ekonomi, ditambah dengan kenyataan bahwa perekonomian setelah kemerdekaan didominasi oleh penduduk etnis Tionghoa, menjadi bahan bakar yang siap disulut kapan saja. Sehingga pada tahun 1963 tercatat terjadi beberapa peristiwa kerusuhan di Jawa Barat yang berlatar belakang sentimen etnis. Gelombang pertama kerusuhan terjadi di kota Cirebon pada tanggal 27 Maret yang dipicu oleh perkelahian pelajar pribumi dan etnis Tionghoa. Gelombang ke dua terjadi di kota Bandung (10 Mei 1963) yang dipicu oleh perkelahian mahasiswa ITB, dan berlanjut pada perusakan toko-toko dan mobil milik warga etnis Tionghoa. Dilaporkan sebanyak 125 toko dan 69 mobil rusak atas kerusuhan ini. Puncak dari kerusuhan di Jawa Barat terjadi di Sukabumi. Selama tiga hari (13-16 Mei) terjadi pelemparan batu terhadap rumah-rumah milik etnis Tionghoa, dan pada tanggal 18 Mei beberapa truk yang bermuatan pelajar-pelajar dari luar Sukabumi melakukan perusakan terhadap properti-properti milik etnis Tionghoa (Mackie, 1976: 100-106).

Politik identitas yang diterapkan oleh pemerintah kolonial juga dilestarikan oleh rezim Orde Baru. Di masa pemerintahan Soeharto warga negara etnis Tionghoa tidak diperbolehkan bergabung menjadi pegawai negeri dan hak-hak politiknya sangat dibatasi. Lagi-lagi masyarakat etnis Tionghoa tidak memiliki banyak pilihan selain beraktivitas di bidang ekonomi. Sehingga ujung dari drama politik identitas ini bisa ditebak, kerusuhan etnis kembali terjadi. Kerusuhan etnis yang terjadi pada tahun 1998 disebut-sebut sebagai yang terburuk dalam sejarah Indonesia (Pattiradjawane, 2000).

Kerusuhan yang tidak jelas diketahui kapan dan apa penyebabnya ini tiba-tiba meluas terjadi di seluruh wilayah ibu kota. Masyarakat yang frustrasi karena krisis ekonomi 1997-1998 bertindak beringas dan merusak toko, bank, perkantoran, pusat

perbelanjaan, dan rumah, yang dianggap milik atau berafiliasi dengan etnis Tionghoa. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tercatat sebanyak 1.190 orang meninggal dunia akibat terbakar atau dibakar, 27 orang akibat senjata dan lainnya, 91 orang luka-luka. Hal itu tidak termasuk korban perkosaan massal yang diderita oleh wanita-wanita keturunan Tionghoa (Pattiradjawane, 2000).

KESIMPULAN

Tulisan ini melengkapi studi-studi mengenai konflik etnis yang ada di Indonesia. Melalui pemaparan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa konflik etnis di Indonesia seringkali dipicu oleh politik identitas yang diciptakan oleh para elit politik daripada oleh faktor-faktor lain. Fakta bahwa antara etnis Jawa dan Tionghoa dapat hidup berdampingan dengan harmonis selama berabad-abad merupakan bukti bahwa konflik di antara keduanya tidak bersifat alamiah. Konflik etnis muncul semenjak kedatangan bangsa kolonial dan menciptakan oposisi biner – hubungan antagonis antara pribumi dan “non-pribumi”. Sejak saat itu konflik etnis di antara kedua pihak menjadi konflik laten yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik terbuka ketika politik identitas dimainkan oleh para elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Al-Qurtuby, Sumanto. (2003). *Arus Cina-Islam-Jawa*. Yogyakarta. Inspeal Ahimsakarya Press.

Astuti, Sri. (2014). *Diskursus Politik Identitas*. Dalam Bainus, Arry. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.

5 Castells, Manuel. (2010). *The Power of Identity*. Malden. Wiley-Blackwell.

Dougherty , James E. dan Pfaltzgraff, Robert. (2001). *Contending Theories of International Relations 5th edition*. Longman.

Held, David. (2003). *Cosmopolitanism: Globalisation Tamed? Review of International Studies*, 29, 465-480.

Lembong, Eddie. *Indonesian Government Policies and the Ethnic Chinese: Some Recent Developments*. (2008). Dalam Suryadinata, Leo., ed. (2008). *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. Singapore. ISEAS.

Lombard, Denys. (2008). *Nusa Jawa: Silang Budaya I*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Lombard, Denys. (2008) *Nusa Jawa: Silang Budaya II* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

7 Mackie, J.A.C, "Anti-Chinese Outbreak in Indonesia, 1959-68. (1976). Dalam Mackie, J.A.C., ed. (1976). *The Chinese in Indonesia*. Melbourne. Thomas Nelson.

Maalouf, Amin. (2012). *In the Name of Identity*. New York. Arcade Publishing.

- Maarif, Ahmad Syafii. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Dalam Fauzi, Ihsan Ali & Panggabean, Samsu Rizal. et.al. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Mulia, Siti Musdah. (2014). Politik Identitas: Ancaman Terhadap Masa Depan Pluralisme di Indonesia. Dalam Fauzi, Ihsan Ali & Panggabean, Samsu Rizal. et.al. (2010). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD).
- Pattiradjawane, Rene. L, Peristiwa Mei 1998 di Jakarta: Titik Terendah Sejarah Orang Etnis Cina di Indonesia. (2000). dalam Wibowo, I, ed. (2000). Harga yang Harus Dibayar: Sketsa Pergulatan Enis Cina di Indonesia. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Snyder, Jack. (2003). Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Toer, Pramoedya Ananta. (2002). Arus Balik. Jakarta. Hasta Mitra.
- Tomoidjojo, Cin Hapsari. (2012). Jawa-Islam-Cina: Politik Jatidiri dalam Jawa Safar Cina Sajadah. Jakarta. Wedatama Widya Sastra.
- Wallerstein, Immanuel. 1997. The National and The Universal: Can There be Such a Thing as World Culture? Dalam King, Anthony D., ed. (1997). *Culture Globalization, and The World-System*. Minneapolis. University of Minnesota Press.
- Wijayakusuma, Hembing. (2005). Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke. Jakarta. Pustaka Populer Obor.

Website:

Abi Sarwanto. 2010. “Amien Rais: Reklamasi Kepentingan Asing dan Aseng”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171010144433-32-247400/amien-rais-reklamasi-kepentingan-asing-dan-aseng/>, diakses pada tanggal 20 November 2017

Martahan Sohuturon. 2016. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160830102627-20-154751/empat-orang-pukuli-pria-tionghoa-di-bus-transjakarta/>

5

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/cosmopolitanism/>

5

<http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/communitarianism/>

Kebangkitan “Aseng”? Studi Sejarah tentang Muncul dan Berkembangnya Konflik Etnis Jawa-Tionghoa

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	mudlifatur-faizah-fib12.web.unair.ac.id	1%
	Internet Source	
2	mohsamsularifin.blogspot.com	1%
	Internet Source	
3	issuu.com	1%
	Internet Source	
4	pt.scribd.com	1%
	Internet Source	
5	"Collaboration in Performance Practice", Springer Nature, 2016	1%
	Publication	
6	besardenganideku.blogspot.com	1%
	Internet Source	
7	Submitted to Soka University of America	1%
	Student Paper	
8	serbacopast.blogspot.co.id	1%
	Internet Source	

Exclude quotes On Exclude matches < 1%
Exclude bibliography On